



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI
SWASTA, DAN DANA PERIMBAGAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR PADA
TAHUN 2003-2016**

Jumasrah

Universitas Muslim Indonesia, Makassar

*corresponding author: Jumasrah_jum@yahoo.com

Received 21 August; Accepted 21 September 2018

Available online 1 October 2018

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue, private investment and balance funds on economic growth in the city of Makassar in the year 2003-2016. Research location in Makassar city and data collection center at BPS office (Central Bureau of Statistics) South Sulawesi. The data used is secondary data (Time Series) during the time period of 14 years (2003-2016). The result of research indicates that local revenue (PAD) has a positive and significant effect on economic growth, private investment has positive and significant impact on economic growth, and balance fund (DP) has negative and significant influence on economic growth in Makassar city.

Keywords: Local original income, Private investment, Balance funds, Economic growth.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikukuhkan dengan Undang - undang (UU) telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang , dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*).

Bank Dunia (1997) dalam Hadi Sumarsono, dan Sugeng Hadi Utomo (2009:67) menyebutkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kemampuan kondisi sebagai berikut: (1) Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan; (2) desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan; (3) desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Dampak positif diberlakukannya desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari perkembangan ekonomi dikota Makassar.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD sehingga harusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan

daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008:45).

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya kenaikan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2003-2016 Rp. 5.096.554.226.405,58 akan tetapi, Kuncoro (2004:103) berpendapat bahwa realitas hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan mekanisme transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan lebih untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang, sehingga perlu dana penyeimbang dari pemerintah pusat agar dapat menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut.

Salah satu tujuan instrument fiskal dari dana perimbangan yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan dan investasi swasta. Kegiatan investasi swasta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan ketersediaan kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam rencana penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar tahun 2003-2016 ?
2. Apakah Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar tahun 2003-2016?
3. Apakah Investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar tahun 2003-2016 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mardiasmo (2009: 24) mengungkapkan, "Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi". Desentralisasi adalah salah satu sistem yang dipakai dalam pemerintahan merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Dalam sistem desentralisasi terjadi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah. Daerah yang mendapatkan kewenangan pemerintah pusat ini untuk mengatur rumah tangga daerah disebut otonomi.

Suatu negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya maka akan mengenal adanya daerah-daerah otonom yang mempunyai kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dan sentralisasi adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola pemerintah dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan kontrol secara garis besar dalam rangka melihat dampak atau kaitannya dengan pelayanan publik Mardiasmo (2009).

Menurut Bird dan Vaillancourt dalam Badrudin (2012: 63), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu 1) dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; 2) delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; dan 3) devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan daerah

Menurut Rochjadi (2006:35), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrument yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perkonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta

kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2004:132) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2016:14).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah terdiri atas.

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian

Jumasrah , 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah...

otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Analisis Implementasi Dana Perimbangan (Kajian Atas Undang-Undang no.25 Tahun 1999 dan PP no. 104 Tahun 2000)

Implementasi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik implementasi dalam peraturan pelaksanaannya maupun realisasi dari dana yang di daerahkan. Dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang “dana perimbangan” sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, dapat memberikan gambaran kepada daerah tentang bagaimana perimbangan keuangan tersebut dijalankan. Daerah dapat memproyeksikan yang akan diterimanya dari dana perimbangan, dengan keluarnya peraturan pemerintah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Yuwono, Cahyono, Suheiry, dan Azrafiany (2008) Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Demikian juga Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer, dan 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Menurut Wijaya (2007) menyatakan bahwa biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lainlain biaya umum yang sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. nasional.

Investasi swasta

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000:47).

Di Indonesia, investasi atau penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian atau dapat berasal dari 2 sumber yaitu :

Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*Direct Investment*) maupun investasi tidak langsung (*Portofolio*) (Suyatno, 2003:56).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki swasta ataupun warga asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan guna menjalankan suatu usaha jangka panjang. Penanaman modal dalam negeri

Jumasrah , 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah...

adalah penggunaan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut ketentuan undang- undang penanaman modal.

Menurut Sukirno (2000:39) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan di bidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses kenaikan output (produksi) dalam jangka panjang (Sunusi, 2014).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang pengaruh pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomidi kota makasar.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di kota Makassar dan instansi pemerintah yang terkait seperti Biro Pusat Statistik. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan informasi

yang jelas tentang pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

Sedangkan waktu penelitian pada bulan januari sampai maret 2018.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : Data sekunder, yaitu data/informasi yang diperoleh melalui referensi atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada pada lokasi penelitian khususnya terhadap data berkaitan pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan dana perimbangan di kota makassar.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data diperoleh dari: Biro Pusat Statistik kota Makassar.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi dokumenter, yaitu menelaah dan memperoleh informasi melalui bukubuku, publikasi, laporan, dan dokumen-dokumen pemerintahan yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.

Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan di atas adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu analisis data dengan mengadakan perhitungan-perhitungan yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode Analisis Data

Merupakan suatu teknik analisis yang dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya dan seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, investasi swasta, dan dana perimbangan

Jumasrah , 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah...

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar Periode 2006-2016. Menurut Gujarati (2012) maka digunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \mu_i \dots\dots\dots (4.3)$$

Keterangan :

Y_i : pertumbuhan ekonomi kota Makassar Periode 2003-2016 β_0 : Intersep yang menggambarkan rata-rata pengaruh dari berbagai variable /faktor yang mempengaruhi Y akan tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan regresi.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi dari masing-masing X_i

X_{1i} : Pendapatan Asli Daerah kota Makassar Periode 2003-2016

X_{2i} : investasi swasta kota Makassar Periode 2003-2016 X_{3i} : Dana Perimbangan kota Makassar Periode 2003-2016 μ_i : Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik

Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dinyatakan dalam satuan rupiah tahun 2003-2016 di Kota Makassar
2. Dana Perimbangan (X2) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Kota Makassar untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi keseluruhan total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH Kota Makassar yang dinyatakan dalam rupiah tahun 2003-2016

3. Investasi Swasta (X3) adalah Total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Makassar yang dinyatakan dalam satuan rupiah tahun 2003-2016
4. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari meningkatnya PDRB Kabupaten/Kota. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dasar harga konstan dalam satuan rupiah tahun 2003-2016

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di kota makassar

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pertumbuhan ekonomi kota makassar berikut ini peneliti menyajikan data PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 1

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2003-2016 di Kota Makassar

No	Tahun	PDRB Harga konstan (miliar rupiah)	Pertumbuhan ekonomi (%)
1	2003	8.882.255	1,74
2	2004	9.782.334	1,11
3	2005	10.492.541	7,26
4	2006	12.261.538	1,77
5	2007	13.561.827	1,15
6	2008	13.651.817	6,72
7	2009	14.798.187	8,39
8	2010	16.252.451	9,82
9	2011	17.820.697	9,64
10	2012	19.582.060	9,88
11	2013	76.907.410	2,92
12	2014	82.596.786	7,39
13	2015	88.740.213	7,43
14	2016	95.836.984,8	7,99

Jumasrah , 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah...

Total		481.067.111	402
-------	--	-------------	-----

Sumber : *BPS Sulawesi Selatan, data diolah*

Secara keseluruhan total PDRB tahun 2003-2016 sebesar 481.067.111 miliar rupiah atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 402 %.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis masing-masing variabel dependen secara parsial terhadap variabel dependennya dapat dianalisis sebagai berikut :

1) Uji hipotesis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari tabel 19 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel pad sebesar 0,000 bila dibandingkan dengan taraf signifikan α (0,10), menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,000<0,10) sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, dengan demikian tingkat pad berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

Berdasarkan hasil regresi, tingkat pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berakhti sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel tingkat pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota makassar. Ini bermakna bahwa kenaikan pendapatan asli daerah memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya (Endrawati,2010). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Endrawati (2010) dan setyawati (2007) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gustiana (2014) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Amin pujiati ,2008 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Uji Hipotesis investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Dari tabel 19 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel investasi sebesar 0,006 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi α (0,10), menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (0,006<0,10) sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, dengan demikian investasi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evrizal Hasan (jurnal ekonomi,2014) yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

Menurut Jhingan melalui investasi maka kegiatan ekonomi akan dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Harrold Domard yang menyatakan bahwa dalam ekonomi dua sektor, investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan dan penambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat.

Menurut Kusumadewi menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

3) Uji Hipotesis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari tabel 19 menunjukkan bahwa nilai signifikan dana perimbangan 0,002 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi α (0,10), menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,002 < 0,10$) sehingga H_0 ditolak H_1 diterima, dengan demikian dana perimbangan berpengaruh secara signifikan tetapi berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil dan signifikansi penelitian bahwa dana perimbangan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil temuan Maryati (2007) dari hasil penelitiannya menyimpulkan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.

Hasil penelitian Menurut Amin Pujiati 2008 menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana (2014) tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan, terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji

Jumasrah , 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah...

regresi menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, sedangkan Investasi Swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar
2. pendapatan asli daerah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Berpengaruh positif ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap nilai PDRB
3. investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Berpengaruh positif ini menunjukkan bahwa investasi swasta berpengaruh positif terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Hasil ini berarti setiap kenaikan investasi berpengaruh positif terhadap nilai PDRB.
4. dana perimbangan DP dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota makassar. Berpengaruh negatif ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap nilai PDRB.

Saran

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu daerah. Adapun beberapa usulan yang ditujukan untuk pemerintah untuk meningkatkan PAD, diantaranya:
 - a. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dari sektor andalan
 - b. Adanya keseimbangan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan
 - c. Mengoptimalkan peran legislatif
 - d. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik
 - e. Kendalikan KKN dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi
 - f. Meningkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi

- g. Meningkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum
2. untuk mendorong peningkatan investasi swasta pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan perbaikan investasi dan membuat kejelasan kerangka hukum yang pasti untuk berinvestasi yang memiliki prinsip utama diantaranya:
 - a. Kesetaraan perlakuan dimanapun berada terlepas dari kewarganegaraan para investor
 - b. perlindungan terhadap pengambilalihan, penyitaan investasi dan pembatalan sepihak atas perjanjian
 - c. kebebasan pengembalian modal investasi dan seluruh prosesnya;
 - d. dan akses keadilan, mekanisme yang cepat dan efektif dalam penyelesaian perselisihan/ sengketa dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Dina. Dan Suryanto, Rudi., 2010, "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. XI No. 1, Januari.
- Ariani, KurniaRina., 2010, "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah EksKaresidenan Surakarta)", Surakarta: FE Universitas Sebelas Maret.
- Arsa. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bali 2006-2013*. Tesis. Universitas Udayana. Bali
- Badan pusat statistik propinsi sulawesi selatan. PDRB. provinsi sulawesi selatan dalam angka 2006-2015. Makassar :sulawesi selatan.
- Ersyad, Muhammad. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)*. Skripsi. FE UNP :Padang.
- Fitriyanti, IsmiRizki., 2009, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Provinsi DIY)", Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UMY. Tidak Terpublikasi.
- Investasi swasta. Propinsi sulawesi selatan dalam angka 2006-2015. Makassar: Sulawesi selatan.
- Propinsi sulawesi selatan dalam angka 2006-2015. Makassar: sulawesi selatan. dana perimbangan. Propinsi sulawesi selatan dalam angka 2006-2015. Makassar: sulawesi selatan.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10.
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 desentralisasi.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 285 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.